

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Literasi keuangan menjadi salah satu faktor terjalannya keuangan yang baik dan kritis terhadap suatu kasus yang kemungkinan dapat menimbulkan kebingungan dan keresahan individu dalam mengambil suatu keputusan. Literasi keuangan merupakan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memiliki kemampuan dan memahami rencana keuangan, stabilitas keuangan, dan pengendalian keuangan dengan baik, teliti, dan tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Literasi keuangan menjadi salah satu edukasi yang perlu diperhatikan oleh kalangan mahasiswa, pengusaha baru yang belum memiliki pengalaman, pengusaha lama, dan pekerja yang telah memiliki banyak pengalaman. Literasi keuangan menjadi tumpuan penting bagi sebuah usaha demi laporan keuangan yang sehat dan optimal. Pentingnya literasi keuangan memberikan kepercayaan besar bagi pemakai laporan keuangan karena terbuktinya keuangan yang baik didasarkan pada kemampuan akan kepekaan individu terhadap peluang dan ancaman terkait keuangan.

Berikut ini beberapa hal penting untuk menerapkan literasi keuangan bagi setiap individu terdiri dari: 1) Pemahaman tentang berbagai macam produk keuangan, 2) Optimalisasi pemanfaatan produk keuangan sesuai kebutuhan, 3) Menjadi inovasi bagi status atau fase hidup, 4) Mencegah kasus pembohongan keuangan, dan 5) Alokasi kekayaan lebih efisien.

Pendidikan literasi keuangan, melalui beberapa pendapat peneliti, berorientasi pada hal yang kritis dan berfokus pada hal yang meluas (HC & Gusaptono, 2021). Hal tersebut dikarenakan bahwa pendidikan lebih membantu individu untuk mengerti tentang perencanaan yang tidak adil dan pengasingan sosial dibandingkan dengan mengetahui masalah keuangan yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan.

Oleh karena itu, literasi keuangan yang sangat baik dapat membongkar dan mengatasi kasus penipuan, pinjaman ilegal, penumpukan utang, gulung tikar, dan kasus buruk lainnya. Tujuan literasi keuangan memberikan arah yang baik untuk sebuah usaha atau rencana keuangan dalam jangka waktu lama. Dalam hal ini, sesungguhnya rencana keuangan individu sangat penting dilakukan sejak awal sebagai suatu hal yang wajib untuk meminimalisir kerugian dalam keuangan yang bahkan sukar untuk diubah.

Pernyataan ini terlihat bahwa media untuk memperoleh literasi keuangan yang baik adalah edukasi keuangan, sehingga dengan meluasnya literasi keuangan masyarakat dapat mencapai peningkatan angka literasi keuangan untuk memperoleh ketentraman hidup (Akmal & Saputra, 2016). Berlandaskan data tahun 2019 pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 mengemukakan bahwa tingginya tingkat pendidikan dan pendapatan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi tingginya tingkat literasi seseorang tersebut (OJK, 2021).

Upaya memajukan angka literasi keuangan Indonesia menjadi salah satu impian negara, khususnya dalam hal membangun suatu usaha termasuk jenis Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Indonesia termasuk negara dengan UMKM yang begitu meluas di berbagai daerah. UMKM merupakan upaya yang dapat meningkatkan perekonomian negara dan memelihara kualitas produk yang dijual ke seluruh penjuru daerah. Sebelum menjalani UMKM, pelaku UMKM tidak terlepas dari rencana keuangan yang dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan penjualan dalam jangka waktu yang lama.

Untuk mencapai tingkat keuangan yang baik, maka perlu bagi para pelaku UMKM memiliki literasi keuangan yang baik pula. Hal tersebut menjadi pengoptimalan bobot layanan keuangan terhadap perekonomian serta pembangunan negara (Yushita, 2017).



Gambar 1. Tingkat Literasi Keuangan Indonesia

Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022
(Data Diolah, 2023)

Berdasarkan persentase tingkat literasi keuangan di Indonesia melalui hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 dalam Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa angka literasi keuangan Indonesia tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 49,68% dibandingkan tahun 2019 sebesar 38,03% (OJK, 2021). Dalam hal ini, pelaku UMKM perlu memahami aspek-aspek literasi keuangan yang dapat mendukung pengetahuan mereka akan penggunaan keuangan yang bijak serta berguna bagi keberlangsungan usaha dalam jangka waktu mendatang.

Pengetahuan mengenai keuangan suatu usaha akan diimplementasikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai alat untuk memperoleh keputusan. Keunggulan pada laporan keuangan UMKM membawa dampak baik dalam memberi kepercayaan kepada para pemakai laporan keuangan untuk memprediksikan bertahannya usaha yang dibangun oleh pelaku UMKM. Jika laporan keuangan terlihat lemah dan banyak menimbulkan penurunan keuangan usaha, hal tersebut akan mengakibatkan usaha cenderung menjadi bangkrut kecuali dilakukan tindakan sebagai solusi mempertahankan usaha.

Terdapat dua hal yang menjadi pemikiran penting ketika berhadapan dengan laporan keuangan UMKM, yaitu diungkapkan bahwa Benjamin (1990) memiliki pandangan bahwa laporan keuangan UMKM melemah disebabkan oleh pengetahuan yang minim terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun di sisi lain, Muntoro (1990) memiliki pandangan bahwa laporan keuangan UMKM melemah karena tidak terdapat peraturan wajib untuk melakukan laporan keuangan UMKM (Mulyani, 2014).

Berdasarkan pernyataan Muntoro tersebut, adanya dampak jika tidak terdapat penerapan laporan keuangan pada UMKM sejak awal membangun usaha, yaitu cenderung terjadinya kecurangan usaha karena tidak terdapat data yang lengkap dan akurat untuk membuktikan kondisi asli keuangan usaha tersebut serta pelaku usaha tidak mengetahui berapa beban pajak UMKM yang wajib ditanggung (Rani Maulida, 2019).

Tidak hanya memiliki laporan keuangan UMKM, melainkan pentingnya pelaku UMKM memiliki kualitas pada laporan keuangan usaha yang dihasilkan. Kualitas pada laporan keuangan usaha tergolong atas kelengkapan laporan dengan pencatatan keuangan yang baik dan aturan pencatatan transaksi yang jujur sehingga tidak menimbulkan pencatatan yang salah, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja berdasarkan standar akuntansi yang digunakan (Mulyani, 2014).

Dengan melihat fenomena tersebut, maka penulis ingin meneliti pelaku UMKM dalam memiliki pengetahuan akan keuangan dasar yang dapat diimplementasikan dalam bentuk laporan keuangan sehingga melalui laporan keuangan tersebut, dapat dilihat cara pelaku UMKM memahami risiko keuangan disertai keterampilan dalam menggunakan jasa dan produk keuangan.

Obyek penelitian ini merupakan literasi keuangan pelaku UMKM Kota Medan dengan menelusuri UMKM bidang *fashion* dan kuliner. Alasan penulis memilih UMKM Kota Medan untuk membandingkan pertumbuhan angka literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM Kota Medan dari penelitian sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Pada hasil penelitian di Kota Medan dari peneliti sebelumnya, dinyatakan bahwa angka literasi keuangan Kota Medan termasuk

rendah sebab masyarakat Kota Medan belum memiliki edukasi keuangan yang baik (Pulungan, 2017). Selain itu, hasil penelitian angka literasi keuangan di salah satu wilayah, yaitu Kecamatan Medan Marelan berkategori *not literate* sebesar 40% dengan pemahaman tentang keuangan yang cukup layak namun masih sulit mengimplementasikan pengetahuan keuangan dalam usaha dan aktivitas keseharian (Ardila et al., 2020).

Melihat hasil penelitian tersebut, penulis ingin menelusuri dan menilai angka literasi keuangan pelaku UMKM Kota Medan dengan bidang *fashion* dan kuliner. Alasan penulis memilih bidang *fashion* dan kuliner karena dua bidang tersebut merupakan bidang UMKM yang mudah dijumpai dan cenderung memiliki banyak peminat. Berikut ini data jumlah UMKM bidang *fashion* dan kuliner tahun 2021 melalui situs Pemko Medan (pemkomedan.go.id) bagian Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan:

Tabel 1.1 Jumlah UKM Bidang *Fashion* Kota Medan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Medan Amplas	191
2.	Medan Area	281
3.	Medan Barat	115
4.	Medan Baru	92
5.	Medan Belawan	136
6.	Medan Deli	202
7.	Medan Denai	150

8.	Medan Helvetia	139
9.	Medan Johor	98
10.	Medan Kota	69
11.	Medan Labuhan	151
12.	Medan Maimun	39
13.	Medan Marelan	138
14.	Medan Perjuangan	138
15.	Medan Petisah	76
16.	Medan Polonia	35
17.	Medan Selayang	112
18.	Medan Sunggal	45
19.	Medan Tembung	75
20.	Medan Timur	274
21.	Medan Tuntungan	246
.	Jumlah Total UMKM Bidang <i>Fashion</i>	2.802

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan.

Tabel 1.2 Jumlah UKM Bidang Kuliner Kota Medan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Medan Amplas	605
2.	Medan Area	911
3.	Medan Barat	718

4.	Medan Baru	432
5.	Medan Belawan	733
6.	Medan Deli	1102
7.	Medan Denai	288
8.	Medan Helvetia	712
9.	Medan Johor	494
10.	Medan Kota	265
11.	Medan Labuhan	693
12.	Medan Maimun	338
13.	Medan Marelan	621
14.	Medan Perjuangan	643
15.	Medan Petisah	533
16.	Medan Polonia	314
17.	Medan Selayang	775
18.	Medan Sunggal	209
19.	Medan Tembung	283
20.	Medan Timur	725
21.	Medan Tuntungan	832
	Jumlah Total UMKM Bidang Kuliner	12.226

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan.

Hal yang dapat membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi survei penelitian dilakukan di beberapa UMKM Kota

Medan, UMKM dengan bidang *fashion* dan kuliner, dan menelusuri UMKM Kota Medan dengan kualitas laporan keuangan usaha yang baik.

Dengan demikian, berlandaskan latar belakang tersebut, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian skripsi lebih dalam dengan judul “**Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pelaku UMKM Kota Medan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat literasi keuangan pelaku UMKM Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengeksplorasi dan menganalisa tingkat literasi keuangan pelaku UMKM Kota Medan.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini berfokus mengenai tingkat literasi keuangan pelaku UMKM Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis pada penelitian ini, yaitu memberikan pengetahuan akan literasi keuangan secara komprehensif bagi para pelaku UMKM Kota Medan yang diharapkan dapat membantu para pembaca di berbagai kalangan untuk menyadari akan pentingnya literasi keuangan sebelum membangun sebuah bisnis kecil maupun bisnis besar. Selain itu, harapannya penelitian ini dapat menjadi tumpuan bagi penyempurnaan angka literasi keuangan di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak antara lain:

1. Bagi Pelaku UMKM

Menjadi penuntun bagi calon pelaku UMKM agar terciptanya perencanaan keuangan usaha yang tanggap dan krusial terhadap problematika kondisi keuangan, baik segi pengeluaran ataupun pemasukan sehingga tidak mengalami kerugian besar serta pelaku UMKM dapat memiliki laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai literasi keuangan yang dibutuhkan bagi usaha-usaha pada pencatatan laporan keuangan UMKM.

BAB II

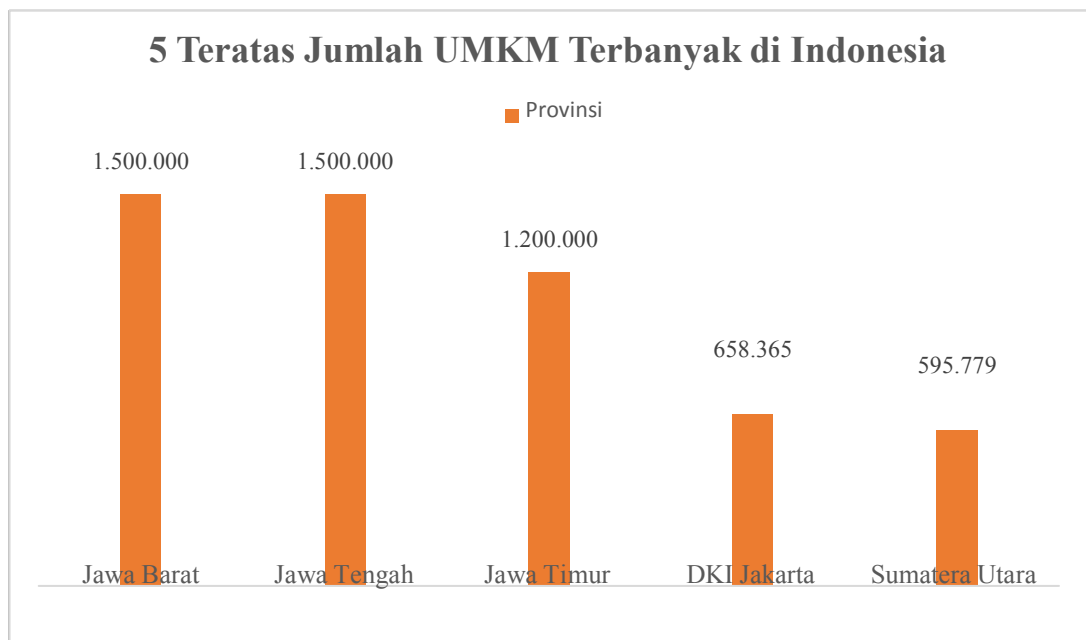
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

2.1.1 Perkembangan dan Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau sering disebut dengan istilah UMKM di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data jumlah UMKM Indonesia pada tahun 2022, provinsi Sumatera Utara, yang di dalamnya termasuk Kota Medan, menduduki peringkat kelima dari 34 provinsi di Indonesia berjumlah 595.779 unit usaha dengan UMKM terbanyak (Santika, 2023).

Berikut ini lima teratas jumlah UMKM terbanyak di Indonesia:



Gambar 2.1 Jumlah UMKM di Indonesia

Sumber: Databoks.katadata.co.id (Data diolah, 2023)

UMKM memiliki tiga bagian usaha dengan definisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, yaitu terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan definisi berikut ini:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yang dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam Undang-Undang.

2.1.2 Peran UMKM bagi Masyarakat Indonesia

UMKM menjadi strategi untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Hal tersebut dikarenakan peran UMKM sangat berpengaruh pada situasi resesi global sebab UMKM dapat berdampak pada penciptaan PDB yang baik dan dapat menembus banyak peluang tenaga kerja serta berpotensi sebagai pasar industri jasa keuangan (Sulastri, 2022).

Pada usaha mikro dan usaha kecil terdapat keistimewaan UMKM yang menggunakan Sumber Daya Alam (SDA) pada bidang perdagangan dan rumah makan, sedangkan pada usaha menengah keistimewaan yang dimiliki meliputi pembenahan pada bidang keuangan dan jasa perusahaan. Selain itu, adanya pergerakan UMKM sangat memadai untuk mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena terdapat berbagai industri dengan masing-masing sektor yang memiliki kemampuan besar untuk berkontribusi dan berpeluang untuk memperbanyak tenaga kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) (Sofyan, 2017).

2.1.3 Kriteria dari Penggolongan UMKM

Melalui pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, terdapat kriteria UMKM yang menjadi pemenuhan persyaratan usaha. Kriteria UMKM terdiri dari:

1. Usaha Mikro

- a) Kekayaan bersih terbanyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Hasil penjualan tahunan terbanyak Rp 300.000.000,00.

2. Usaha Kecil

- a) Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan terbanyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan terbanyak Rp 2.500.000.000,00.

3. Usaha Menengah

- a) Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan terbanyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan terbanyak Rp 50.000.000.000,00.

2.2 Laporan Keuangan UMKM

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang dimiliki oleh setiap tingkat usaha dan perdagangan untuk mengetahui kondisi keuangan dari usaha itu sendiri sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan pada perencanaan kegiatan perusahaan selanjutnya agar tidak menimbulkan rugi membesar. Selain itu, laporan keuangan juga sangat berperan penting sebagai informasi manajemen untuk memperoleh gambaran perkembangan perusahaan yang sudah atau sedang terjadi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) menjadi jenis standar akuntansi sederhana yang digunakan sebagai laporan keuangan UMKM meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang diakui (IAI, 2016).

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan dalam memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang sebagai media informasi keuangan yang menjadi tolok ukur dalam

mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan. Berikut ini beberapa tujuan laporan keuangan berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2018), yaitu:

1. Sebagai informasi pada posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang berguna untuk pengguna dalam pengambilan keputusan akhir.
2. Sebagai laporan keuangan yang dapat memenuhi keperluan pengguna.
3. Sebagai laporan keuangan yang dibutuhkan manajemen dalam melakukan peran terhadap sumber daya yang bersangkutan.

Dalam penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, hal ini bertujuan untuk membantu mempermudah pelaku UMKM melakukan pelaporan keuangan yang efisien, mudah dimengerti, konkrit, dan transparan. Selain itu, tujuan dilakukannya laporan keuangan (Kasmir, 2019) adalah sebagai:

1. Informasi atas total aset dalam suatu perusahaan
2. Informasi atas total liabilitas dan ekuitas milik perusahaan
3. Informasi atas total pendapatan dan pengeluaran
4. Informasi atas performa manajemen dalam periode tertentu
5. Informasi atas pencatatan transaksi dalam laporan keuangan

2.2.3 Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki manfaat sebagai pelengkap informasi atas kondisi keuangan suatu usaha. Hal ini dikhususkan pada UMKM dengan menerapkan hasil laporan keuangan yang dimiliki sebagai informasi terpercaya

untuk mengukur keberhasilan usaha dan peluang usaha memperoleh keuntungan yang lebih optimal.

Laporan keuangan yang dimiliki berguna untuk meninjau, menilai, dan membandingkan dampak keuangan agar dapat mengambil keputusan dengan konsiderasi tertentu. Selain itu, manfaat laporan keuangan juga terdapat pada kemampuan pengelolaan keuangan suatu usaha, karena melalui laporan keuangan tersebut dapat terlihat bagaimana pengetahuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya.

2.2.4 Ketentuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang jelas menjadi nilai penting untuk mengoptimalkan kualitas laporan keuangan usaha. Berikut ini ketentuan dalam laporan keuangan berlandaskan pernyataan Wiratna Sujarweni (Ariana, 2016), yaitu:

1. Dimengerti

Laporan keuangan yang mudah dimengerti oleh si pengguna laporan menjadi keunggulan bagi performa laporan keuangan itu sendiri dengan mempelajari lebih dalam terkait ekonomi, bisnis serta keuangan.

2. Selaras

Informasi keuangan yang selaras (bersangkut paut) mempermudah pengambilan keputusan karena didasarkan pada pertimbangan atas laporan keuangan di masa lalu, masa sekarang, dan prediksi di masa depan.

3. Andal

Keandalan penyampaian laporan keuangan yang jelas dan jujur dapat mempengaruhi berkurangnya informasi sesat yang cenderung membingungkan si pengguna laporan keuangan.

4. Konsiderasi

Perlakuan evaluasi laporan keuangan membutuhkan pertimbangan pada laporan keuangan pada perusahaan yang satu dengan laporan keuangan pada perusahaan yang lainnya terkait posisi dan kondisi keuangan yang sedang dialami perusahaan.

5. Daya Uji

Laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya dengan memberlakukan laporan berdasarkan konsep dan prinsip akuntansi yang sah.

6. Netral

Laporan keuangan yang disampaikan tidak boleh memihak dengan kepentingan pribadi si pengguna tertentu.

7. Akurasi Waktu

Laporan keuangan wajib disusun dan dipersiapkan pada waktu yang tepat (tanpa *delay*)

8. Komprehensif

Laporan keuangan yang disusun wajib bersifat komprehensif sehingga memudahkan pembaca laporan dalam memahami maksud dari isi laporan keuangan tersebut.

2.2.5 Jenis Laporan Keuangan UMKM

Dalam hal ini, jenis laporan keuangan yang wajib disediakan oleh UMKM mengarah kepada laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan hukum menggunakan dasar biaya historis.

Penjelasan dan susunan pada masing-masing laporan keuangan UMKM tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada Laporan Posisi Keuangan UMKM terdiri dari:
 - a. Aset mencakup aset lancar dan aset tidak lancar
 - b. Liabilitas yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang
 - c. Ekuitas yaitu modal dan saldo laba pada tanggal terkait

Berikut susunan Laporan Posisi Keuangan UMKM sesuai SAK EMKM:

**Entitas UMKM Laporan
Posisi Keuangan
31 Desember 20x7 dan 20x6**

ASET	Catatan	20x7	20x6
Kas dan Setara Kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
Total Kas dan Setara Kas		xxx	xxx
Piutang Usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx

Aset Tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xxx)	(xxx)
TOTAL ASET		xxx	xxx
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Utang Usaha		xxx	xxx
Utang Bank	8	xxx	xxx
Total Liabilitas		xxx	xxx
Ekuitas			
Modal		xxx	xxx
Saldo Laba	9	xxx	xxx
Total Ekuitas		xxx	xxx
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		xxx	xxx

Gambar 2.2 Susunan Laporan Posisi Keuangan UMKM

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia

2. Pada Laporan Laba Rugi untuk memperoleh hasil dari perhitungan pendapatan dan beban sehingga terdapat hasil akhir laba atau rugi keuangan UMKM.

Berikut susunan Laporan Laba Rugi UMKM sesuai SAK EMKM:

Entitas UMKM			
Laporan Laba Rugi			
31 Desember 20x7 dan 20x6			
PENDAPATAN	Catatan	20x7	20x6
Pendapatan Usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan Lain-Lain		xxx	xxx
TOTAL PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			

Beban Usaha	11	xxx	xxx
Beban Lain-Lain		xxx	xxx
TOTAL BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban Pajak Penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Gambar 2.3 Susunan Laporan Laba Rugi UMKM

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia

3. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi informasi tambahan dan penjelasan pada laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Berikut susunan Catatan Atas Laporan Keuangan UMKM sesuai SAK EMKM:

Entitas UMKM
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 20x7 dan 20x6

1. INFORMASI UMUM

Entitas UMKM didirikan di Medan pada 1 November 2018 berdasarkan persetujuan sertifikat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor xx/KUMHAM.xx/2018 tanggal 1 November 2018. Entitas UMKM bergerak di bidang kuliner telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dalam Surat Pernyataan Pendirian. Entitas berdomisili di Jalan xx No. xx, Medan, Sumatera Utara.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Pernyataan Kepatuhan

Susunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan keuangan merupakan biaya historis dengan menggunakan biaya akrual dan mata uang dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

3. Piutang Usaha

Piutang usaha sesuai dengan besarnya jumlah tagihan yang dimiliki dan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

4. Persediaan

Persediaan berupa biaya perolehan yang mencakup biaya pembelian, biaya angkutan, dan biaya lain-lain.

5. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan yang disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan tidak terhitung nilai residu.

6. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui saat diterbitkan tagihan atau pengiriman dilakukan bagi pelanggan. Sedangkan beban yang ditanggung dapat diakui pada saat terjadi pengeluaran.

7. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan disesuaikan dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

3. KAS DAN SETARA KAS

(Dalam Rupiah)	<u>20x7</u>	<u>20x6</u>
Kas Kecil	xxx	xxx
Total Kas dan Setara Kas	xxx	xxx

4. GIRO

(Dalam Rupiah)	<u>20x7</u>	<u>20x6</u>
PT Bank ABC	xxx	xxx

5. DEPOSITO

(Dalam Rupiah)	<u>20x7</u>	<u>20x6</u>
PT Bank ABC	xxx	xxx
Suku Bunga Deposito:	<u>20x7</u>	<u>20x6</u>
Rupiah	4,50%	5,00%

6. PIUTANG USAHA

(Dalam Rupiah)	<u>20x7</u>	<u>20x6</u>
Pelanggan A	xxx	xxx
Pelanggan B	xxx	xxx
Total Piutang Usaha	xxx	xxx

7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

(Dalam Rupiah)	<u>20x7</u>	<u>20x6</u>
Sewa	xxx	xxx
Lisensi dan izin usaha	xxx	xxx
Total biaya dibayar di muka	xxx	xxx

8. UTANG BANK

Entitas UMKM mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) tanggal 5 Agustus 20x7 sebagai pinjaman dari Bank XYZ maksimal kredit Rp xxx, suku bunga 11% per tahun, dan jatuh tempo pada 10 September 20x7 dengan jaminan persediaan yang dimiliki entitas.

9. SALDO LABA

Labanya ditahan atau saldo laba merupakan hasil dari laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi dan dikurangi dengan dividen yang dibayar.

10. PENDAPATAN

(Dalam Rupiah)	<u>20x7</u>	<u>20x6</u>
Penjualan toko	xxx	xxx
Retur dan Potongan Penjualan	xxx	xxx
Total Pendapatan Usaha	xxx	xxx

11. BEBAN

(Dalam Rupiah)	<u>20x7</u>	<u>20x6</u>
Beban gaji pegawai	xxx	xxx
Beban lain-lain	xxx	xxx
Total Beban	xxx	xxx

12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

(Dalam Rupiah)

Pajak Penghasilan

20x7

xxx

20x6

xxx

Gambar 2.4 Susunan Catatan Atas Laporan Keuangan UMKM**Sumber:** Ikatan Akuntan Indonesia**2.2.6 Pentingnya Laporan Keuangan UMKM**

Usaha seorang pelaku UMKM pasti membutuhkan perencanaan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan UMKM itu sendiri. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami penggunaan laporan keuangan bagi usaha mereka yang seharusnya perlu diperhatikan agar usaha dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan dalam usaha. Ketidapkahaman pelaku UMKM terhadap penggunaan laporan keuangan dapat terjadi karena UMKM hanya berfokus dengan produk dan pemasaran saja serta mengira bahwa laporan keuangan tidak begitu penting bagi usaha mereka (Purwantiningsih, 2021).

Berikut ini menjadi alasan betapa pentingnya laporan keuangan bagi kemajuan UMKM, di antaranya sebagai kebutuhan rencana bisnis, media informasi atas kondisi keuangan usaha, media informasi dalam pengambilan keputusan usaha, dan pembayaran pajak usaha.

2.2.6.1 Kebutuhan Rencana Bisnis Usaha

Merencanakan keuangan sebelum merintis bisnis usaha merupakan suatu kemudahan bagi pelaku bisnis untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi selama menjalankan bisnis nantinya.

Rencana bisnis usaha dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pengeluaran yang berlebih. Laporan keuangan UMKM menjadi gambaran atas rencana bisnis usaha untuk mengetahui perkembangan usaha dari awal dirintis hingga seiring berjalannya waktu.

2.2.6.2 Media Informasi atas Kondisi Keuangan Usaha

Kondisi keuangan usaha berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pelaku UMKM karena terdapat informasi secara jelas terkait jumlah aktiva, utang, beban, serta modal sebagai sumber atas hasil kinerja usaha.

Informasi tersebut berdasarkan laporan keuangan yang disediakan pelaku usaha untuk mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat menghindari kerugian berlebih dengan menyesuaikan kondisi keuangan yang ada.

2.2.6.3 Media Informasi dalam Pengambilan Keputusan

Jika UMKM tidak menerapkan laporan keuangan pada usahanya, ada dua hal yang akan menghambat pertumbuhan usahanya, yaitu pelaku UMKM tidak akan pernah mengetahui pertumbuhan usahanya dari masa ke masa secara nyata berdasarkan data laporan keuangan sehingga UMKM hanya dapat memprediksikan usahanya dengan bayangan saja dan pelaku UMKM tidak melakukan pengambilan

keputusan yang baik karena media informasi keuangan yang tidak lengkap bahkan tidak ada laporan keuangan sama sekali.

2.2.6.4 Pembayaran Pajak Usaha

Dengan adanya laporan keuangan dapat memudahkan pelaku UMKM mengetahui jumlah beban pajak yang ditanggung sebagai kewajiban yang harus dibayar dengan melakukan perhitungan pembayaran pajak.

Pajak UMKM yang diperoleh adalah PPh Final dengan tarif pajak sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Setelah dihitung pajak yang akan ditanggung, maka jumlah pajak yang ditanggung dapat diterapkan pada bagian Laporan Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM.

2.3 Literasi Keuangan

2.3.1 Definisi Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk peka dan melek terhadap keuangan, mempertimbangkan biaya-biaya yang dibutuhkan, sampai dengan pengambilan keputusan di akhir.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa literasi keuangan memiliki bagian-bagian yang dapat mempengaruhi perilaku dalam mengoptimalkan keputusan yang tepat serta pengendalian keuangan yang baik untuk mencapai ketentraman, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan pada keuangan itu sendiri.

Dalam pernyataan Y. Li (2018), literasi keuangan berkaitan dengan keamanan ekonomi yang lebih besar sebagai pertanda terhadap kebutuhan pengetahuan dan keterampilan untuk manajemen sumber daya keuangan (Weller, 2018).

2.3.2 Manfaat Literasi Keuangan

Tidak hanya sekadar memiliki literasi keuangan, melainkan ada manfaat yang dapat dirasakan individu ketika telah memiliki keterampilan dalam hal keuangan, di antaranya adalah: 1) terhindar dari kasus penipuan atau pinjaman ilegal, mampu mengendalikan keuangan dalam jumlah besar maupun kecil, 2) mampu memprediksikan keuangan di masa mendatang, 3) bijak dalam memanfaatkan keuangan untuk hal yang penting dilakukan, serta 4) dapat menganalisa keuangan yang sulit diatasi sehingga harus dapat memiliki strategi untuk menangani keuangan tersebut.

2.3.3 Aspek-Aspek Literasi Keuangan

Bagi kepentingan UMKM, literasi keuangan meliputi beberapa aspek sebagai dasar dalam mengoptimalkan kualitas laporan keuangan UMKM. Aspek-aspek literasi keuangan terdiri dari lima bagian berdasarkan pernyataan Nababan dan Sadalia (2012) (Hidajat, 2016), meliputi:

1. Pengetahuan Keuangan Dasar

Pengetahuan keuangan dasar merupakan pengertian individu terhadap sistem keuangan yang masih mendasar. Misalnya, pengertian aset, liabilitas, bunga, biaya-biaya, dan sebagainya. Pemahaman terhadap keuangan menjadi hal penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui fungsi dari akun-akun tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan

Literasi keuangan memiliki peran dalam hal pengelolaan keuangan. Jika individu ahli dalam memahami literasi keuangan bahkan keuangan yang sulit sekalipun, maka akan semakin baik dan sehat laporan keuangan yang dihasilkan individu tersebut. Contoh dari mengelola keuangan di antaranya adalah dapat mengalokasikan dana dengan strategi pemakaian dana yang bijak, menentukan aset, mempertimbangkan utang usaha, menyisihkan uang untuk pembayaran tagihan, memisahkan dana untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan pribadi, dan sebagainya.

3. Pengendalian Kredit

Pengendalian kredit merupakan aktivitas dimana bagian-bagian dari aktivitas tersebut saling berkaitan ketika melakukan operasi atau proses sistem dalam menyediakan informasi kredit bank. Seorang pelaku usaha harus dapat menghitung dan menganalisa kemampuan membayar utang, memahami pengendalian usaha, memiliki keseriusan dalam mengatur keuangan usaha, dan memiliki jaminan yang layak untuk diberikan bantuan dana dari bank.

4. Tabungan dan Investasi

Tabungan merupakan uang yang dimiliki individu sebagai simpanan untuk kebutuhan di masa mendatang atau untuk kondisi tertentu. Sedangkan investasi

merupakan uang yang dikelola dan dimanfaatkan oleh individu sebagai keperluan di masa mendatang dengan harapan dapat memiliki nilai atau pendapatan yang lebih tinggi. Penting bagi pelaku usaha memiliki pengetahuan berinvestasi guna menambah modal dan penghasilan untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan usaha.

5. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan cara individu untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan keuangan dengan untung yang maksimal agar dapat mengurangi kerugian saat terjadi risiko besar. Selain itu, pengendalian risiko keuangan juga menjadi keputusan akhir yang berpengaruh pada pendapatan dan perencanaan usaha di masa mendatang. Cara mengendalikan risiko keuangan antara lain melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), menstabilkan biaya agar tidak melebihi rencana anggaran, melakukan peminjaman uang dengan bijak dan kritis, dan sebagainya (Bayu, 2022).

2.3.4 Tingkat Literasi Keuangan

Literasi keuangan setiap individu memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda tergantung bagaimana individu tersebut mengoptimalkan keuangan pribadi ataupun keuangan bisnis yang justru kebutuhannya berbeda pula. Tingkat literasi keuangan dijadikan sebagai pengukuran terhadap kualitas laporan keuangan, perencanaan keuangan, dan kemampuan mengendalikan keuangan yang dianggap sebagai gambaran kondisi kesehatan keuangan sebuah usaha, termasuk UMKM.

Pada tingkat literasi keuangan dapat dinilai apakah pelaku usaha memiliki literasi keuangan yang tinggi, sedang, atau rendah. Penilaian ini berdasarkan persentase yang menjadi ukuran dari gambaran tingkat literasi keuangan yang dimiliki. Berikut ini terdapat tiga bagian tingkat literasi keuangan yang dikategorikan menurut Chen and Volpe (1998), terdiri dari:

1. Di bawah 60% dengan tingkat literasi keuangan berkategori rendah.
2. Di antara 60% sampai 80% dengan tingkat literasi keuangan berkategori sedang.
3. Di atas 80% dengan tingkat literasi keuangan berkategori tinggi.

Untuk dapat menyimpulkan jenis literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM apakah baik atau tidak, berikut ini dijabarkan empat tingkatan literasi keuangan berlandaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:

1. *Well literate*

Mencakup kemampuan dalam pengetahuan dan kepercayaan terhadap lembaga dan jasa atau produk keuangan, meliputi fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban dan memiliki keterampilan dalam pemakaian jasa dan produk keuangan.

2. *Sufficient literate*

Mencakup kemampuan pengetahuan dan kepercayaan terhadap lembaga dan jasa atau produk keuangan, meliputi fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban berhubungan dengan jasa dan produk keuangan.

3. *Less literate*

Hanya mencakup kemampuan pengetahuan terhadap lembaga dan jasa atau produk keuangan.

4. *Not literate*

Tidak mempunyai pengetahuan dan kepercayaan terhadap lembaga dan jasa atau produk keuangan, serta tidak terampil dalam pemakaian jasa dan produk keuangan.

2.4 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diterapkan sebagai tumpuan untuk membandingkan satu penelitian dengan penelitian lainnya yang sepadan sehingga dapat memperoleh hasil penelitian baru selanjutnya. Beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi perbandingan pada penelitian ini, di antaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

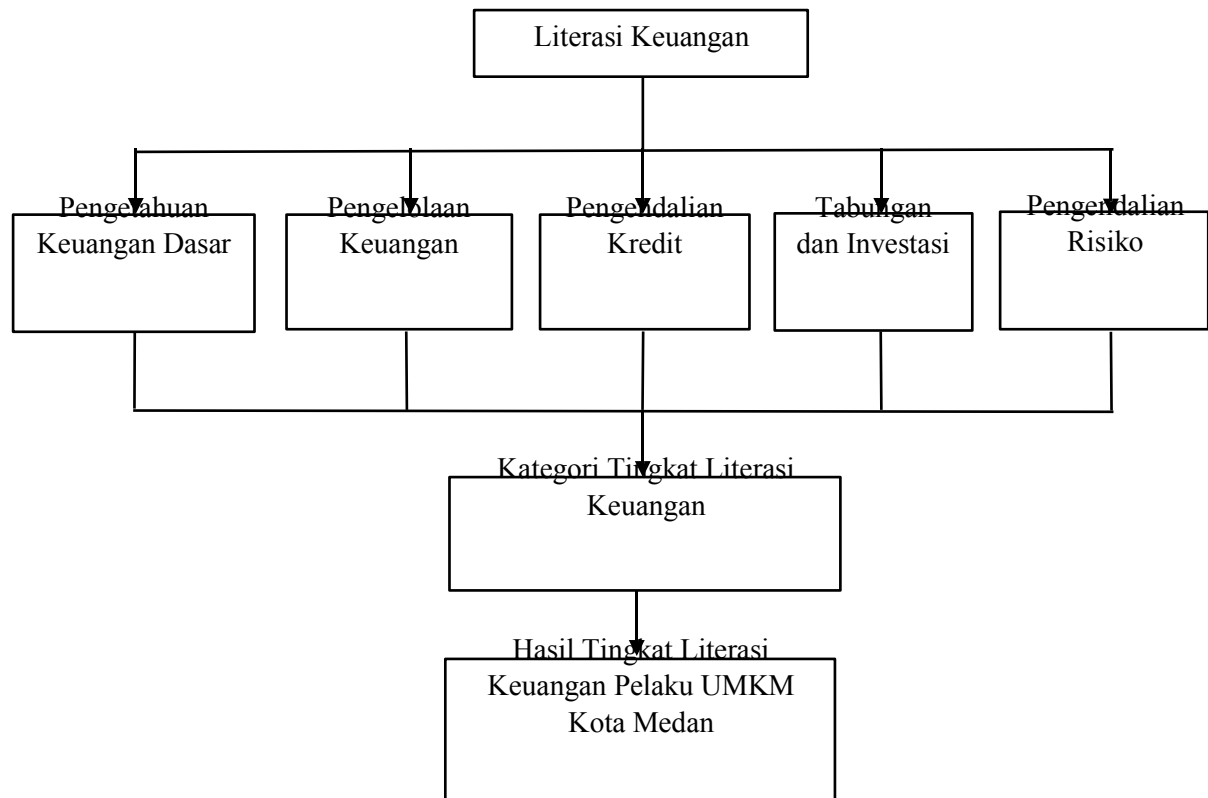
No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rospita Yanti Br. Sitorus (2022)	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pada Pelaku UMKM di Kawasan Klinik Pratama Bulan Mulya Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Rata-rata tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM berada pada kategori sedang sebesar 74,3%.
2.	Aulia Latifatul Afifah, dkk (2021)	Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan UMKM Pada UMKM di Kota Mataram	Rata-rata tingkat literasi keuangan pada UMKM Kota Mataram berada pada kategori sedang sebesar 76%.
3.	Susie Suryani dan Surya Ramadhan (2017)	Analisis Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro di Kota Pekanbaru	Tingkat literasi keuangan pada pelaku Usaha Mikro Kota

			Pekanbaru berada pada kategori sedang.
4.	Isna Ardila, Masta Sembiring, Elfi Azhar (2020)	Analisis Literasi Keuangan Pelaku UMKM	Tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM Kecamatan Medan Marelan berada pada kategori <i>not literate</i> sebesar 40%.
5.	Joko Prihatin dan Ahmad Maruf (2019)	Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerajinan Perak di Kotagede Yogyakarta	Tingkat literasi keuangan pelaku UMKM kerajinan perak Kotagede berada pada kategori sedang.
6.	Sandra Ayu Satyawati (2019)	Analisis Tingkat Literasi Keuangan UMKM Kota Solo	Tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM Kota Solo berada pada kategori <i>sufficient literate</i> .

Sumber: Data diolah, 2023.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berdasarkan pernyataan Sugiyono (2019) adalah suatu bentuk model pendukung terhadap ulasan masalah mengenai teori dengan berbagai faktor yang terekognisi sehingga dapat memperlengkapi isi penelitian. Berikut ini variabel tingkat literasi keuangan dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan keuangan dasar, pengelolaan keuangan, pengendalian kredit, tabungan dan investasi, dan pengendalian risiko.



Gambar 2.5 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Medan dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada pelaku UMKM Kota Medan. Lama penelitian pada penyebaran kuesioner dan wawancara untuk mengetahui tingkat literasi keuangan pelaku UMKM Kota Medan pada 13 – 26 Maret 2023.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan kumpulan subyek ataupun obyek dengan meneliti masalah dan fenomena terkait kualitas sifat dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM Kota Medan. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi sebagai perwakilan untuk dijadikan penelitian berlanjut. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 70 responden.

Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling* yang merupakan pengambilan sampel secara langsung dan mudah tanpa perlu menentukan jumlahnya. Menurut Hajar (1996), pada pemilihan sampel diungkapkan bahwa semakin besar jumlah sampel yang diambil, maka cenderung memperoleh hasil yang semakin baik sebab terdapat probabilitas yang tinggi untuk menyamakan rata-rata (mean) dan standar deviasi populasi dengan rata-rata (mean) dan standar deviasi yang dihasilkan (Alwi, 2015).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2017) pengertian data primer merupakan sumber data yang diberikan secara langsung kepada pihak yang memerlukan data.

Data primer yang digunakan merupakan pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, survei, dan observasi. Alasan penulis memilih pengumpulan data primer adalah karena diperlukan data yang baru untuk melihat tingkat literasi keuangan pelaku UMKM Kota Medan yang saat ini sebagai target penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua tahap, yaitu kuesioner dan wawancara. Tahap kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dengan skala likert. Menurut Sugiyono (2016) penggunaan skala likert untuk mengetahui ukuran pendapat dan rekognisi individu serta kelompok mengenai suatu fenomena.

Skala likert yang dilakukan memiliki pilihan Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Skala likert dengan pilihan “Netral” tidak diikutsertakan dalam kuesioner agar responden dapat memahami pertanyaan yang tertera pada kuesioner yang disebut sebagai modifikasi skala likert. Berdasarkan pernyataan Sutrisno Hadi (1991) bahwa modifikasi skala likert bertujuan untuk tidak menimbulkan taksa atau makna ambigu pada kategori Netral sehingga ada jawaban pasti dan tidak mengakibatkan data informasi kuesioner berkurang yang

diperoleh dari responden (Yuniastuti, 2018). Berikut ini tabel skala likert berdasarkan skor:

Tabel 3.1 Skala Likert Variabel

Alternatif Jawaban	Singkatan	Skor
Sangat Setuju	SS	4
Setuju	S	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Menurut Soepriadi (2015) bahwa untuk mengetahui interval dari hasil kuesioner, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Kategori}}$$

Berdasarkan rumus perhitungan interval tersebut, berikut ini cara menentukan nilai maksimal dan nilai minimal dalam kuesioner berdasarkan jawaban responden:

1. Nilai Maksimal = Sampel x Jumlah Pernyataan Instrumen x Skor Maksimal
2. Nilai Minimal = Sampel x Jumlah Pernyataan Instrumen x Skor Minimal

Tahap wawancara digunakan untuk mencari tahu informasi tambahan terkait usaha yang dijalani pelaku UMKM mengenai hal-hal di luar pernyataan kuesioner.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Sutama (2016) mengungkapkan definisi operasional adalah penentuan makna variabel untuk menilai, mengelompokkan, atau memanipulasi variabel dengan pelaksanaan khusus dalam kebutuhan penelitian hipotesis (Salma, 2022).

Tiga bagian pada penelitian ini, di antaranya: 1) Dimensi merupakan pengumpulan informasi terkait obyek yang diteliti sehingga dapat mendalami isi dari penelitian, 2) Indikator adalah keadaan-keadaan yang diukur sebagai suatu indikasi, 3) Skala pengukuran adalah tumpuan yang dilakukan pada hal-hal yang terjadi ataupun tidak terjadi berdasarkan pengukuran yang ditentukan.

Tabel 3.2 Pengukuran Variabel

Dimensi	Indikator	Pengumpulan Data	Skala Ukur
Pengetahuan Keuangan Dasar	1. Memahami arti maupun fungsi dari keuangan dasar, meliputi aset, liabilitas, bunga, biaya, dan sebagainya. 2. Mempertimbangkan aset, biaya, dan utang untuk keperluan usaha 3. Memahami perhitungan keuangan untuk masa kini dan masa yang akan datang 4. Memahami pajak usaha sesuai perhitungan pajak yang ditanggung 5. Berkemampuan dalam perencanaan keuangan usaha	Kuesioner Skala Likert	Interval

<p>Pengelolaan Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan penggunaan dana dengan strategi pemakaian yang bijak 2. Mempertimbangkan aset, biaya, dan utang untuk meminimalisir pengeluaran secara berlebih 3. Melakukan pencatatan transaksi secara sistematis sesuai jumlah transaksi yang terjadi 4. Memisahkan dana untuk kebutuhan usaha dan pribadi 5. Membuat target belanja untuk jangka waktu mendatang 	<p>Kuesioner Skala Likert</p>	<p>Interval</p>
<p>Pengendalian Kredit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menganalisa dan menghitung pembayaran utang 2. Serius mengatur keuangan usaha dari modal yang dimiliki 3. Memahami pengendalian dalam aktivitas usaha 4. Memiliki jaminan yang layak untuk mendapatkan pinjaman uang dari bank 5. Memahami dan disiplin terhadap kebijakan kredit 	<p>Kuesioner Skala Likert</p>	<p>Interval</p>
<p>Tabungan dan Investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tabungan di bank sebagai dana yang digunakan untuk usaha masa mendatang 2. Memanfaatkan uang yang telah ditabung di bank dengan bijak 	<p>Kuesioner Skala Likert</p>	<p>Interval</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Melakukan investasi sebagai penghasilan tambahan di masa mendatang 4. Berpengetahuan terhadap investasi yang digunakan 5. Menggunakan uang tabungan dan investasi sebagai pemenuhan kebutuhan usaha 		
Pengendalian Risiko	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengidentifikasi penyebab kerugian usaha 2. Selalu memantau aktivitas keuangan usaha 3. Menstabilkan biaya agar tidak melebihi perencanaan anggaran 4. Menerapkan analisis SWOT untuk mengetahui risiko keuangan usaha 5. Melakukan peminjaman uang dengan bijak dan kritis 	Kuesioner Skala Likert	Interval

Sumber: Data diolah, 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data adalah teknik analisis kuantitatif deskriptif. Teknik analisis kuantitatif deskriptif merupakan data yang telah terkumpul melalui penelitian kuesioner untuk diolah dan diukur dalam bentuk angka sehingga dapat memperoleh kesimpulan akhir berdasarkan hasil data yang telah dikuantitatifkan. Pada teknik analisis kuantitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan pelaku UMKM Kota Medan.

3.6.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk melakukan penganalisaan suatu data yang dikumpulkan dengan menjelaskan kesimpulan dari data tersebut (Sugiyono, 2018). Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menilai tingkat literasi keuangan pelaku UMKM Kota Medan dengan melihat nilai rata-rata (*mean*).

Statistika deskriptif merupakan penelitian statistik berupa penggambaran dan penguraian data agar lebih mudah dimengerti dengan pemberian data dalam menetapkan ukuran berupa: 1) Rata-rata (*Mean*) sebagai perhitungan pada rata-rata populasi yang diperoleh dari sampel, 2) Penyimpangan (*Deviasion Standart*) sebagai penerapan penyebaran data untuk melihat kedekatan sampel statistik dan kejauhan penyimpangan statistik, serta 3) Nilai maksimum dan minimum dalam penelitian untuk pemantauan nilai maksimum dan minimum dari populasi.

Berdasarkan pernyataan Chen dan Volpe (1998) dalam (Afifah et al., 2021), terdapat 3 (tiga) bagian pada tingkat literasi keuangan menurut interval kelas dari kategori di bawah ini yang meliputi:

Tabel 3.3 Kategori Tingkat Literasi Keuangan

Persentase Interval Kelas	Kategori
Lebih dari 80%	Tinggi
Antara 60% sampai dengan 80%	Sedang
Kurang dari 60%	Rendah

Sumber: Chen dan Volpe (1998) dalam Afifah, dkk (2021)

3.7 Uji Kuesioner Penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Dilakukan uji validitas sebagai pengukuran valid atau tidak kuesioner yang ingin diukur berdasarkan pertanyaan atau instrumen dari kuesioner tersebut dengan menggunakan SPSS *Statistics* 25. Berdasarkan pernyataan Sugiyono (2009), uji validitas dilakukan dengan mengambil sebanyak 30 responden agar dapat diperoleh hasil uji dengan nilai mendekati kurva normal.

Jika kuesioner valid, maka pertanyaan pada kuesioner sudah terukur dengan tepat dan benar. Sari Simamora (2019: 34) menyatakan bahwa diperoleh uji validitas berdasarkan hasil dari r_{hitung} dengan r_{tabel} dimana nilai signifikansi 5% berasal dari *degrees of freedom* (df) = $n - 2$, dimana n merupakan jumlah sampel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan kuesioner dinyatakan valid
2. Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan kuesioner dinyatakan tidak valid

3.7.2 Uji Reliabilitas

Dilakukan uji reliabilitas agar dapat melihat bahwa alat yang difungsikan bisa tepat dan konsisten apabila diukur berkali-kali. Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* agar dapat menyatakan reliabel jika nilai lebih besar dari 0,600 (Ghozali, 2018). Jika tidak terjadi valid dan reliabel suatu butir pertanyaan, maka hal tersebut tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dilanjutkan dalam penelitian.

Berikut ini tingkat reliabilitas berdasarkan rentang nilai r yang akan dibahas pada penelitian ini:

Tabel 3.4 Tingkat Reliabilitas *Cronbach's Alpha*

<i>Cronbach's Alpha</i>	Kategori Reliabilitas
0,800 hingga 1,000	Sangat Kuat
0,600 hingga 0,799	Kuat
0,400 hingga 0,599	Cukup Kuat
0,200 hingga 0,399	Rendah
0,00 hingga 0,199	Sangat Rendah

Sumber: Sugiyono (2010)